

SKRIPSI
ANALISIS PENGELOLAAN PASAR TRADISONAL
SUMEDANG KOTA DI UPT PASAR KOTA
KABUPATEN SUMEDANG

Di susun Oleh :

NAMA : ALDI AGUNG RIZALDI
NOMOR POKOK : E. 1635222731
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
STIA Sebelas April Sumedang



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG
2020

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN


Judul Skripsi:

**ANALISIS PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
SUMEDANG KOTA DI UPT PASAR KOTA
KABUPATEN SUMEDANG**


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. Arip Rahman Sudrajat., M. Si
NIDN. 04-1811-8402

Pembimbing II,


Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si
NIDN. 04-1605-8703

Mengetahui,
Ketua STIA Sebelas April Sumedang




Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si
NIDN. 0430127102

PERNYATAAN

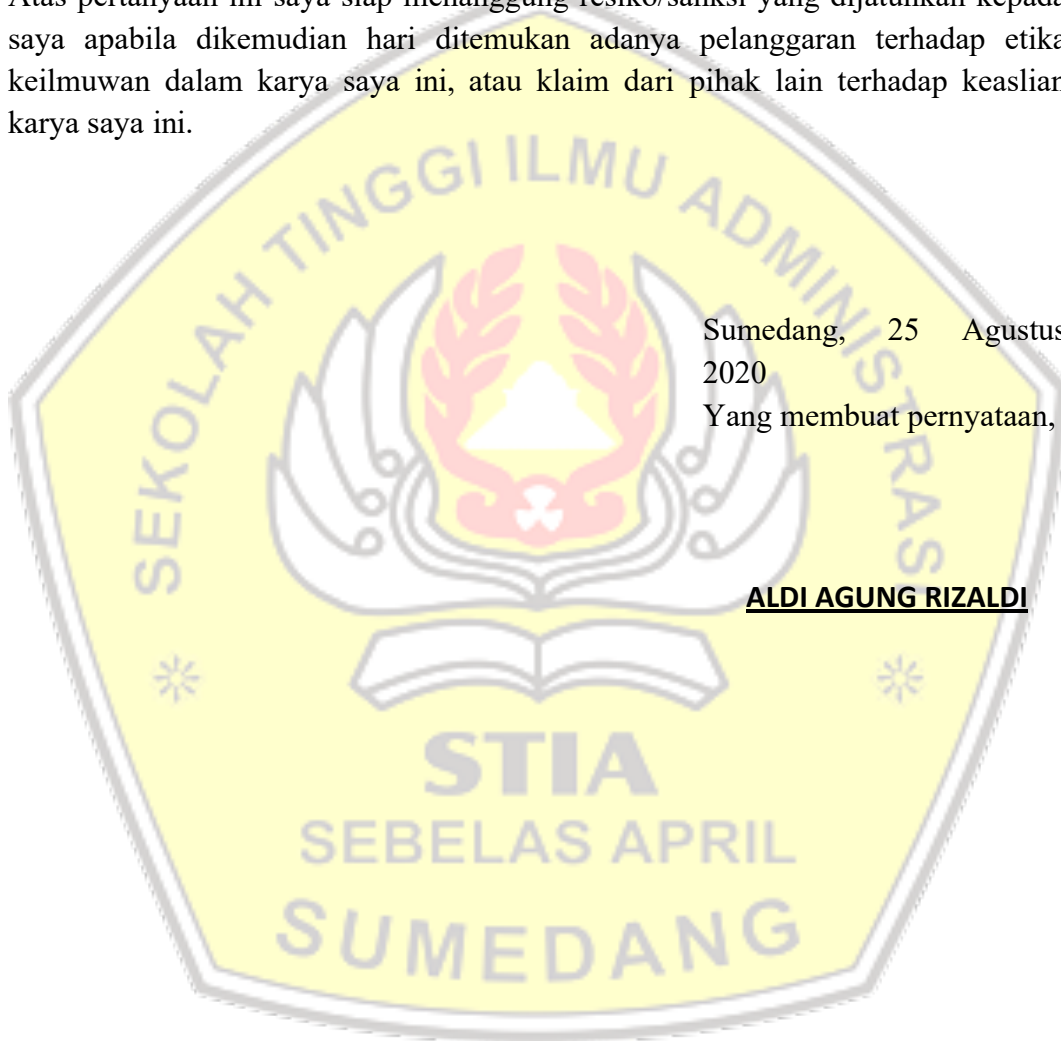
Saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL SUMEDANG KOTA DI UPT PASAR KOTA KABUPATEN SUMEDANG**” ini, sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pertanyaan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, 25 Agustus
2020

Yang membuat pernyataan,

ALDI AGUNG RIZALDI



ABSTRAK
**ANALISIS PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL SUMEDANG
KOTA DI UPT PASAR KOTA KABUPATEN SUMEDANG**

NAMA : ALDI AGUNG RIZALDI
NOMOR POKOK : E.1635222731
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

161 halaman, 5 bab, 59 tabel, 6 gambar, 9 lampiran
Daftar Pustaka: 34 buku dan dokumen-dokumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengelolaan pasar, hambatan-hambatan dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan pengelolaan pasar tradisional di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi analisis kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dengan informan penelitian: Kepala UPT Pasar, Kasubag Tata Usaha, Koordinator Pasar Inpres, Koordinator Kebersihan dan Koordinator Urusan Administrasi. Teknik pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan prosedur pengolahan data menggunakan analisis data model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah: Reduksi data, Penyajian data, *Conclusion Drawing/Verification* dan Triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan pasar tradisional sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa hal yaitu belum maksimalnya pengambilan keputusan para pegawai, kekurangan roda kebersihan dan kurangnya keahlian komunikasi para pegawai. Adapun beberapa saran dari penulis yang kiranya dapat dijadikan referensi dan rekomendasi untuk mendukung kelancaran pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang yaitu, mengembangkan kembali keahlian pegawai dalam penguasaan dan pemeliharaan alat agar alat yang tersedia dapat dimaksimalkan dengan baik sembari menunggu penambahan roda yang belum terealisasi, perlunya peningkatan komunikasi yang baik dari petugas pelaksana dengan cara pelatihan dikarenakan anggaran yang terbatas untuk melakukan diklat maka bisa melalui media sosial seperti Youtube, terdapat banyak konten ilmu komunikasi di Youtube juga. Menjalinkan koordinasi dengan para pedagang agar dapat mengelola sampah secara mandiri agar para petugas kebersihan tidak perlu kesusahan ketika melakukan pengangkutan, yang dimana nantinya selalu menghambat dalam penagihan retribusi, dan meningkatkan dalam hal pengawasan para pegawai di lapangan dengan itu para pegawai akan lebih bekerja keras dalam pekerjaannya terutama dalam kebersihan lingkungan pasar tradisional Sumedang Kota.

Kata kunci: Pengelolaan Pasar Tradisional.

ABSTRACT

ANALYSIS OF TRADITIONAL MARKET MANAGEMENT IN SUMEDANG CITY IN UPT PASAR KOTA SUMEDANG DISTRICT

NAME : ALDI AGUNG RIZALDI
MAIN NUMBER : E.1635222731
STUDY PROGRAM : STATE ADMINISTRATION SCIENCE

161 pages, 5 chapter, 59 table, 6 pictures, 9 attachment

Bibliography: 34 books dan document-document.

This study aims to analyze the problems of market management, constraints and efforts to overcome the barriers to traditional market management in UPT Pasar Kota, Sumedang Regency.

The research method used is descriptive research using a qualitative analysis study approach. The sampling technique used was purposive sampling. With research informants: Head of UPT Pasar, Head of Sub Division of Administration, Coordinator of Presidential Market, Coordinator of Cleanliness and Coordinator of Administrative Affairs. Data collection techniques through literature study and field studies. While the data processing procedure uses data analysis model of Miles and Huberman with the following steps: data reduction, data presentation, conclusion drawing / verification and triangulation.

Based on the research results, it is concluded that the management of traditional markets has been implemented properly but has not been optimal. This can be seen from several things, namely the inadequate decision-making of employees, a lack of cleaning wheels and a lack of communication skills among employees. As for some suggestions from the author that can be used as references and recommendations to support the smooth management of the Sumedang Kota traditional market at the UPT Pasar Kota Sumedang Regency, namely, to re-develop employee skills in mastering and maintaining tools so that the available tools can be maximized properly while waiting for the addition of wheels that are used. has not yet been realized, the need to improve good communication from implementing officers by means of training because of the limited budget for conducting training, it can be through social media such as Youtube, there is a lot of communication science content on Youtube as well. Coordinating with traders in order to manage waste independently so that Cleaners do not need to have trouble when carrying out transportation, which in turn always hinders the collection of fees, and increases the supervision of employees in the field so that the employees will work harder in the workforce its activities, especially in the cleanliness of the Sumedang Kota traditional market.

Keyword: Traditional Market Management.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL SUMEDANG KOTA DI UPT PASAR KOTA KABUPATEN SUMEDANG”**.

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program Studi Strata 1 (S1) pada jurusan Administrasi Negara Sebelas April Sumedang.

Dalam penyusunan telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk penyusunan proposal penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu diantaranya:

1. Yth. Bapak H. Yuyun Hidayat, Drs., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang.
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
6. Yth. Bapak Dr. Arip Rahman Sudrajat, M.Si sebagai Dosen pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini.
7. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si sebagai Dosen pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini.

8. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Yth. Seluruh Staff TU Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang yang telah membantu penulis selama penelitian.
10. Yth. Bapak Iyep Iwan Warsito, S.Sos selaku Kepala UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang yang telah memberikan ijin penelitian.
11. Yth. Bapak/Ibu seluruh pegawai UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang yang telah membantu penulis selama penelitian.
12. Orang tua tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang tidak pernah putus untuk keberhasilan penyusunan proposal penelitian ini.
13. Keluarga tercinta yang mana telah membantu saya baik dari segi material maupun segi motivasi selama dalam penyusunan proporsal ini.
14. Muhammad Guntur DJ, Sitiana Nur Hifni, Dessy Shalehah Saputri dan Erina Nurfadilah yang membantu serta membuat perkuliahan terasa lebih mudah dan tidak terasa sudah berakhir.
14. Sahabat-sahabatku, Keluarga parkiran, Seluruh kantin unsap, Bapak/Ibu dari teman-temanku, Sobat Gamingku di HDRL E-sports, Rekan Tour Leaderku di CV. Lingga Buana yang telah hadir dalam kehidupan perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal penelitian ini sangat jauh dari sempurna. Karena disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis.

Akhir kata semoga amal kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Sumedang, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KARYA TULIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakekat Adminitrasi	8
1. Pengertian Administrasi.....	8
2. Pengertian Administrasi Negara	10
a) Fungsi Administrasi Negara.....	11
3. Ruang Lingkup Administrasi Negara	12
a) Pengertian Organisasi	12
b) Prinsip-prinsip Organisasi	14
4. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian	19
B. Pengertian Manajemen.....	21
1. Fungsi-fungsi Manajemen	22

2. Prinsip-prinsip Manajemen.....	23
C. Pengertian Pengelolaan Pasar	26
1. Pengertian Pengelolaan.....	26
2. Tujuan Pengelolaan.....	28
3. Pengertian Pasar Tradisional.....	30
4. Dimensi Pengelolaan Pasar Tradisional.....	31
5. Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Pasar Tradisional	36
6. Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan Pasar	36
D. Kajian Penelitian Terdahulu	37
E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	43
1. Kerangka Pemikiran.....	43
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	47
B. Penentuan Sasaran, Informasi dan Narasumber Penelitian.....	50
1. Penentuan Sasaran	50
2. Informan Penelitian.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data.....	51
D. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	52
E. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	55
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang	57
2. Visi Misi UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.....	58
3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pada UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.....	59
4. Keadaan Pegawai UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.....	63
5. Keadaan Fasilitas Kerja UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.....	66

B. Analisis Pengelolaan Pasar Tradisional Sumedang Kota di UPTD Pasar Sumedang Kota.....	67
1. Planning (Perencanaan)	69
2. Organizing (Pengorganisasian).....	78
3. Actuating (Penggerakan)	85
4. Controlling (Pengawasan)	98
C. Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Pasar Tradisional Sumedang Kota di UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.....	109
1. Pengambilan Keputusan.....	109
2. Aspek Kualitatif.....	117
D. Upaya-Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan Pasar Tradisional Sumedang Kota di UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.....	132
1. Keterampilan Teknikal.....	133
2. Keterampilan Manusia	142
3. Keterampilan Konseptual.....	148
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	158
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 2.2	Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian	45
Tabel 3.1	Informan Penelitian	51
Tabel 3.2	Jadwal Kegiatan Penelitian 2019/2020	55
Tabel 4.1	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkatan Jabatan	65
Tabel 4.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	65
Tabel 4.3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	66
Tabel 4.4	Keadaan Pegawai Berdasarkan Rentang Usia	66
Tabel 4.5	Keadaan Sarana Prasarana UPTD Pasar Sumedang Kota	67
Tabel 4.6	Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 1: Penetapan Tujuan.....	67
Tabel 4.7	Trianggulasi Penetapan Tujuan.....	71
Tabel 4.8	Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 2: Program kerja	73
Tabel 4.9	Trianggulasi Program Kerja.....	74
Tabel 4.10	Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 3: Penganggaran	76
Tabel 4.11	Trianggulasi Penganggaran.....	77
Tabel 4.12	Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 4: Prinsip Pembagian Kerja.....	79
Tabel 4.13	Trianggulasi Pembagian Kerja.....	81
Tabel 4.14	Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 5: Prinsip Otoritas Dan Tanggung Jawab.....	83
Tabel 4.15	Trianggulasi Prinsip Otoritas dan Tanggung Jawab	84
Tabel 4.16	Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 6: Pengarahan	86
Tabel 4.17	Trianggulasi Pengarahan.....	87
Tabel 4.18	Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 7: Motivasi.....	89
Tabel 4.19	Trianggulasi Motivasi	90
Tabel 4.20	Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 8: Koordinasi	92
Tabel 4.21	Trianggulasi Koordinasi.....	93

Tabel 4.22 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 9: Bimbingan	95
Tabel 4.23 Trianggulasi Bimbingan.....	97
Tabel 4.24 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 10: Pengawasan .	99
Tabel 4.25 Trianggulasi Pengawasan	100
Tabel 4.26 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 11: Asas Tanggung Jawab Pengawasan	103
Tabel 4.27 Trianggulasi Asas Tanggung Jawab Pengawasan.....	104
Tabel 4.28 Rekapitulasi Analisis Pengelolaan Pasar Tradisional Sumedang Kota Di UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.....	105
Tabel 4.29 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 12: Pengambilan Keputusan Kegiatan yang Repetitif	111
Tabel 4.30 Trianggulasi Pengambilan Keputusan yang Repetitif.....	112
Tabel 4.31 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 13: Subjektivitas Dalam Pengambilan Keputusan	114
Tabel 4.32 Trianggulasi Subjektivitas dalam Pengambilan Keputusan.....	116
Tabel 4.33 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 14: Keterbatasan Dalam Pengetahuan Bidang	118
Tabel 4.34 Trianggulasi Keterbatasan dalam Pengetahuan Bidang.....	119
Tabel 4.35 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 15: Keterbatasan Dalam Pengalaman.....	122
Tabel 4.36 Trianggulasi Keterbatasan dalam Pengalaman	122
Tabel 4.37 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 16: Keterbatasan Dalam Kewenangan	125
Tabel 4.38 Trianggulasi Keterbatasan dalam Kewenangan.....	126
Tabel 4.39 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 17: Keterbatasan Dalam Pengetahuan, Pengumpulan dan Pemanfaatan Data.....	128
Tabel 4.40 Trianggulasi Keterbatasan dalam Pengetahuan, Pengumpulan Dan Pemanfaatan Data	129
Tabel 4.41 Rekapitulasi Fakor-faktor Pengelolaan Pasar Tradisional Sumedang Kota di UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.....	130
Tabel 4.42 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 18: Penguasaan	

Alat-alat.....	134
Tabel 4.43 Trianggulasi Penguasaan Alat-alat.....	135
Tabel 4.44 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 19: Penguasaan Prosedur-prosedur	138
Tabel 4.45 Trianggulasi Penguasaan Prosedur-prosedur	139
Tabel 4.46 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 20: Penguasaan Teknik-teknik	141
Tabel 4.47 Trianggulasi Penguasaan Prosedur-prosedur	142
Tabel 4.48 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 21: Penegasan Arahan.....	144
Tabel 4.49 Trianggulasi Penegasan Arahan.....	145
Tabel 4.50 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 22: Penyampaian Informasi Singkat dan Jelas	147
Tabel 4.51 Trianggulasi Penyampaian Informasi Singkat dan Jelas.....	148
Tabel 4.52 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 23: Pengawasan Langsung.....	150
Tabel 4.53 Trianggulasi Pengawasan Langsung.....	151
Tabel 4.54 Reduksi Hasil Wawancara Pertanyaan Item No 24: Memahami Organisasi Secara Menyeluruh	153
Tabel 4.53 Trianggulasi Memahami Organisasi Secara Menyeluruh.....	154
Tabel 4.55 Rekapitulasi Upaya-Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan Pasar Tradisional Sumedang Kota di UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.....	155

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 3.1	Desain Penelitian.....	49
Gambar 3.2	Komponen dalam Analisis Data.....	53
Gambar 3.3	Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data	54
Gambar 3.4	Triangulasi “Sumber” Pengumpulan Data	55
Gambar 4.1	Struktur Organisasi UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang	60



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor 006/SK-STIA/UN/K/I/2020. Tentang Penetapan Mahasiswa Penyusun Skripsi, Judul Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2019/2020.
2. Surat Izin Penelitian dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
3. Berita Acara Bimbingan Skripsi
4. Pedoman Wawancara
5. Pedoman Observasi
6. Pedoman Dokumentasi
7. Dokumentasi Penelitian
8. Prosedur Pengolahan Data
9. Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sektor ekonomi, baik sektor formal maupun sektor informal merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu daerah dan bahkan suatu bangsa. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kemauan dan kemampuan daerah itu sendiri. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Fasilitas-fasilitas umum yang ada dapat mempermudah kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pasar menjadi salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi suatu daerah. Pasar merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan politis, dan lain-lainnya.

Pasar bermula dari keinginan sejumlah orang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada mulanya transaksi dilakukan dengan dilakukan sistem barter, yakni sistem yang diterapkan antara dua orang individu dengan cara tukar menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya, misalnya seperti seorang petani menukarkan hasil pertaniannya dengan pakaian, seorang nelayan menukar ikan dengan kelontong yang dibutuhkan. Proses tersebut dilakukan disembarang tempat dan lama kelamaan terbentuk kesepakatan untuk melakukan barter tersebut

di suatu tempat, kemudian jadilah tempat tersebut semacam tempat barter hasil produksi masing-masing dan tempat inilah yang dinamakan pasar.

Seiringnya berjalannya waktu, transaksi yang dilakukan oleh orang-orang bukan lagi barter, melainkan transaksi tersebut dilakukan dengan mata uang sebagai alat tukar menukar yang menjadi dasar seluruh proses pertukaran, maka proses tersebut dinamakan proses jual beli.

Peningkatan penduduk yang sangat cepat, hal ini ditandai dengan adanya berbagai perubahan sistem sosial, perubahan pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut kini telah banyak muncul fasilitas perbelanjaan yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, salah satunya adalah pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi jual beli secara langsung, transaksi tersebut biasanya dilakukan pada kios, los dan dasaran yang terbuka (emperan), yang dibuka oleh penjual maupun oleh pihak pengelola pasar. Pasar tradisional sampai sekarang tetap bertahan dan menyatu serta memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat meskipun saat ini banyak bermunculan fasilitas-fasilitas perbelanjaan lainnya yang lebih modern.

Pada umumnya, pasar tradisional menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala kecil, menengah sampai makro yang sebagian besar menjajakan produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan tangan dan sebagainya.

Pasar tradisional tidak hanya berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pedagang di Indonesia, namun juga memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya, baik dengan memasarkan produknya secara langsung di pasar maupun melalui perantara pemasok atau agen. Pada akhirnya pasar memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh *stakeholder* yang terlibat didalamnya baik produsen, pedagang, pemasok dan pembeli termasuk bagi para pelaku penunjang seperti tukang parkir. Bagi pemerintah dan pihak-pihak lainnya sebagai pengelola juga mendapat manfaat dari pemasukan atau retribusi yang akan disalurkan kembali bagi kepentingan masyarakat luas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional mendefinisikan bahwa pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan yang dimaksud meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Dalam pelaksanaannya Bupati/Walikota melalui SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD, sedangkan pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap kebijakan pengelolaan pasar tradisional, pengelola dan pedagang, pendapatan dan belanja pengelolaan pasar dan sarana dan prasarana. Dengan adanya peraturan tersebut, kondisi/keadaan pasar idealnya dari segi penataan harus baik, penataan kios dan los harus beraturan sehingga pedagang bisa menjajakan dagangannya dengan

rapih, sarana dan prasarana lengkap, kondisi lingkungan yang bersih serta aturan-aturan yang tegas.

Pada saat ini, pasar tradisional di Indonesia jumlahnya begitu banyak yang berada diseluruh daerah/wilayah baik dari pedesaan sampai perkotaan, salah satunya yaitu pasar tradisional Sumedang Kota yang berada di wilayah pusat kota dari Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bahwa Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu. Salah satunya adalah UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang yang menangani Pasar Tradisional Sumedang Kota Kabupaten Sumedang.

Pasar tradisional Sumedang Kota secara historis telah lama berdiri, dibangun atas prakarsa pemerintah daerah, lembaga daerah dan masyarakat. Pasar tersebut adalah salah satu sumber pendapatan dan kekayaan untuk dikelola serta dimanfaatkan bagi kepentingan pemerintah, baik dalam bidang pembangunan dan bidang pelayanan masyarakat.

Pasar tersebut sampai sekarang masih tetap ada dan tetap bertahan meskipun banyak bermunculan fasilitas-fasilitas perbelanjaan lainnya yang lebih modern diantaranya Minimarket yang menawarkan berbagai keunggulan, seperti kualitas barang yang bermutu dan kenyamanan bagi para pembeli/konsumen pada saat berbelanja. Dengan jumlah kios dan los yang tercatat saat ini sebagai berikut :

Tempat	Pemilik	Jumlah Orang
Kios	358 Pemilik	273 Orang
Los	312 Pemilik	193 Orang
Jumlah Kios dan Los	670 Pemilik	466 Orang

Sumber: Buku Pendataan Jumlah Kios dan Los Pasar Tradisional Kabupaten Sumedang

Dalam jurnal Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang perkembangan pasar modern seperti Minimarket dan sebagainya semakin hari semakin menjamur, pasar tradisional cenderung kalah bersaing dengan pasar modern tersebut membuat pasar tradisional relatif sepi yang memberikan pengertian bahwa sektor pasar tradisional merupakan tempat yang kotor, becek disaat musim penghujan, banyak sampah, pedagang berjualan disembarang tempat dan sebagainya.

Akan tetapi, di pasar tradisional Sumedang Kota justru menunjukkan semaraknya masyarakat yang sangat antusias melakukan proses jual beli begitu ramai, namun kurang terarah dalam sistem kelolanya, hal tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pengecekan fasilitas terhadap kios ataupun los yang ada di pasar tradisional Sumedang kota. Hal ini dapat dilihat masih adanya kios atau los yang bocor maupun saluran tersumbat, diperkuat dengan informasi dari salah satu pegawai UPT Pasar Kota.
2. Kurangnya penegasan aturan kepada pegawai penagih retribusi, sehingga target pencapaian di pasar tradisional tidak tercapai.

3. Penyampaian informasi terkadang kurang dipahami oleh pedagang di pasar tradisional Sumedang Kota. Hal ini dapat dilihat dari adanya pedagang yang kurang mengetahui informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pasar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL SUMEDANG KOTA DI UPT PASAR KOTA KABUPATEN SUMEDANG”**.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan setelah melakukan observasi awal di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang, maka yang dijadikan fokus permasalahannya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan pasar tradisional Sumedang di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran mengenai.

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh UPT Pasar Kota dalam pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna untuk berbagai pihak terkait baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau nilai tambah bagi pengembangan konsep-konsep dan teori-teori, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam satu kebijakan dan perbaikan-perbaikan dalam hal pengelolaan pasar.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi semua pihak yang terlibat langsung mengenai pengelolaan Pasar Tradisional Sumedang Kota Kabupaten Sumedang, dimana pihak terkait dalam pengelolaan tersebut yaitu UPT Pasar Kota.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi

1. Pengertian Administrasi

Menurut Silalahi (2006: 2) secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk *infinitifnya to administer*. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English* (dalam Silalahi, 2016: 2-3), kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan).

Akadun (2011: 18) memberikan definisi administrasi secara sempit yakni: “Secara sempit, Administrasi diartikan sebagai pekerjaan-pekerjaan klerikal atau ketatausahaan.

Selanjutnya Silalahi (2016: 5) mengemukakan administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai berikut: “Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain”.

Munawardi (dalam Silalahi, 2016: 6) mengemukakan bahwa:

Administrasi adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan-hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi dalam arti sempit adalah letatausahaan dalam penyusunan dan

pencatatan serta pengaturan yang rapi dan sistematis data, informasi dan fakta-fakta secara tertulis untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memeperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu data dengan lainnya.

Administrasi merupakan suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan bersama. Seperti pendapat beberapa ahli yang memberikan definisi atau pengertian mengenai administrasi tersebut

Menurut Akadun (2011: 18) pengertian administrasi secara luas yakni:

Secara luas administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan keorganisasian. Bahkan administrasi juga dapat diartikan sebagai pendayagunaan atau pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan keorganisasian.

Selanjutnya Gie (dalam Syafie, 2010: 14) memeberikan pengertian administrasi sebagai berikut: “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu”.

Senada dengan pendapat tersebut, Ordway Tead (dalam Silalahi, 2016: 10) mengemukakan sebagai berikut:

Administration is conceived as the necessary activities of the these individuals (executives) in an organization who are charge with ordering, forwarding, and facilitating the associate efforts of group of individuals brought together to realize certain defiened pupose.(Administrasi adalah meliputi kegiatan-kegiatan individu-individu (eksekutif) dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha kerjasam sekelompok individu-individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan).

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi dalam arti luas adalah segenap rangkaian kegiatan kerja sama individu-individu dalam organisasi dalam penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditentukan.

2. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan berbagai kegiatan dan administrasi negara sangat berhubungan dengan aparatur pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan untuk pembangunan penyusunan standar pelayanan.

Administrasi negara dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam berbagai bidang aspek kehidupan serta harus menjadi penunjang terwujudnya *Good Governance*.

Pengertian administrasi negara dikemukakan oleh Anggara (2006:159) bahwa “Administrasi negara adalah ilmu pengetahuan (cabang ilmu administrasi) yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern struktur-struktur serta proses-proses yang terdapat dibagian yang sangat penting dari sistem dan aparatur pemerintahan.”

Iskandar (2005:1) mengemukakan pendapatnya bahwa “Administrasi negara adalah salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan yang sesungguhnya sudah ada semenjak keberadaan sistem politik disuatu negara”.

Pemahaman tentang Administrasi Negara menurut Waldo (dalam Iskandar, 2005: 18) mengemukakan bahwa : “Administrasi Negara sebagai suatu organisasi

dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.”

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi negara merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk mengatur urusan-urusan negara.

a) Fungsi Administrasi Negara

Dalam fungsi kegiatannya, Fayol (dalam Winardi, 2000: 4) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu:

1. Merencanakan,
2. Mengorganisasi
3. Memimpin,
4. Melaksanakan pengkoordinasian,
5. Melaksanakan pengawasan.

Pendapat lain dikemukakan Lewaysky (dalam Silalahi, 2009: 98) mengemukakan bahwa: “Administrasi kadang-kadang merujuk pada kata-kata khusus baik sebagai manajemen atau organisasi, sehingga sering diterjemahkan menjadi manajemen atau organisasi, sehingga sering diterjemahkan menjadi manajemen administratif atau organisasi administratif”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan administrasi atau manajemen meliputi fungsi-fungsi administrasi yang harus dilaksanakan dalam organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, melaksanakan pengorganisasian serta pengawasan

3. Ruang Lingkup Administrasi Negara

a) Pengertian Organisasi

Pada dasarnya setiap manusia memiliki keterbatasan dalam kemampuan, baik dari segi fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian. Sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan, mengingat terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia untuk membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi.

Organisasi berasal dari bahasa Yunani “*organon*” yang berarti alat. Adapun menurut para ahli, organisasi diartikan sebagai berikut:

Hasibuan (2004: 120) mengemukakan sebagai berikut: “*Organization is form of every human asociation for the attainment of common purpose*”. (Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama).

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Siagian (2000: 64) mengemukakan definisi organisasi adalah sebagai berikut:

Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Max Weber (dalam Silalahi, 2007: 124) suatu organisasi atau kelompok kerjasama sebagai suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan mempunyai unsur-unsur propertis sebagai berikut:

1. Organisasi merupakan tata hubungan sosial : dimana individu yang melakukan kerjasama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.
2. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu dimana individu yang melakukan interaksi dengan individu lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri, melainkan berdasarkan dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang telah disepakati.
3. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan masyarakat lain. Tata aturan ini menentukan proses interaksi diantara orang-orang yang melakukan kerjasama sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
4. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi.

Unsur-unsur (*element*) organisasi menurut Harris & Carson (dalam Silalahi, 2007: 127) adalah sebagai berikut:

1. *Objectives* (tujuan-tujuan), yaitu arah atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan memberi petunjuk dalam memudahkan pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan atau dikerjakan.
2. *Spesialization* (spesialisasi), yaitu pembagian atau pengelompokan pekerjaan dalam berbagai bidang berdasarkan kepentingan, sehingga tiap anggota atau orang mengerjakan bidang pekerjaan yang sesuai dengan skill (keterampilan) yang dimiliki.
3. *Hierarchy* (tingkat atau jenjang), yaitu berhubungan dengan tingkat – tingkat wewenang yang membedakan antara peranan atasan dan bawahan.
4. *Authority* (otoritas atau wewenang) yaitu hak yang sah (legal) dan resmi (*official*) dimiliki seseorang dalam bertindak untuk memerintah, menggerakkan atau memaksa orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Maka berdasarkan pengertian organisasi menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan berkumpulnya dua orang atau lebih yang memiliki tujuan serupa, kemudian secara bersama-sama mencapai tujuan tersebut dengan membentuk suatu perkumpulan.

b) Prinsip-Prinsip Organisasi

Wursanto (2005: 219-220) menyatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang baik apabila organisasi itu memiliki prinsip-prinsip berikut ini:

1. Perumusuan Tujuan Dengan Jelas
2. Prinsip Kesatuan Perintah
3. Prinsip Keseimbangan
4. Prinsip Pendistribusikan Pekerjaan
5. Prinsip Rentangan Pengawasan
6. Prinsip Pelimpahan Wewenang
7. Prinsip Departementalisasi
8. Prinsip Penempatan Orang Yang Tepat
9. Prinsip Koordinasi
10. Prinsip Balas Jasa Yang Memuaskan

Tujuan merupakan suatu yang harus ada dan dimiliki oleh setiap manusia, baik itu tujuan hidup, tujuan bekerja dan tujuan-tujuan lainnya. Sama halnya dengan organisasi yang dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, karena tidak mungkin terbentuk suatu organisasi tanpa adanya tujuan.

Prinsip kesatuan perintah disebut juga prinsip kesatuan komando. Wursanto (2005: 223) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kesatuan perintah atau kesatuan komando adalah setiap dalam organisasi hendaknya mempunyai suatu atasan langsung”. Kedatuan perintah atau kesatuan komando merupakan terjemahan dari istilah bahasa inggris yakni *Unity Of Command, One Master, Responsibility To One Superior*. W. Warren Haynes & Joseph L. Massie (dalam Sutarto, 2006: 192) menyatakan bahwa *No Man Can Serve Two Bosses*, artinya tidak ada orang yang dapat melayani dua kepala atau dua pimpinan.

Hal ini berarti setiap anggota hanya dapat diperintah secara langsung oleh satu orang atasan atau pimpinan. Garis-garis saluran perintah dan tanggung jawab juga harus dengan jelas menunjukkan dari siapa seorang anggota menerima perintah dan kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Sehubungan dengan ini Marry Cushing Nile (dalam Sutarto, 2006: 192) juga mengatakan bahwa: “Tiap-tiap jabatan harus melapor kepada seseorang dan hanya satu orang. Azas itu menunjukkan sebagai kesatuan perintah”.

Organisasi selalu membutuhkan azas keseimbangan, artinya satuan-satuan organisasi hendaknya ditempatkan pada struktur organisasi sesuai dengan peranannya. Selain itu, beberapa satuan organisasi yang memiliki peranan sama penting harus ditempatkan pada jenjang organisasi yang setingkat sebagaimana dikemukakan oleh Sutarto (2006: 196) bahwa:

Satuan yang berperan penting hendaknya dijadikan satuan utama jangan dijadikan satuan lanjutan. Dengan diletakkan sebagai satuan utama yang berkedudukan langsung di bawah pucuk pimpinan, satuan yang berperan penting tadi benar-benar dapat menjalankan perannya dengan baik, sebaliknya apabila berperan penting tetapi hanya diletakkan sebagai satu satuan lanjutan yang berkedudukan pada jenjang di bawah maka tidak akan dapat berperan sesuai dengan harapan sebagai satuan yang berperan menentukan lanjutnya organisasi.

Prinsip pendistribusian pekerjaan (*Distribution Of Work*) disebut juga prinsip pembagian tugas atau pekerjaan. Wursanto (2005: 230) menyatakan bahwa “Prinsip pembagian pekerjaan secara homogen atau *Distribution Of Work* adalah mengelompokkan tugas atau pekerjaan yang sejenis atau yang erat hubungannya menjadi satu unit tersendiri”. Jadi, dalam pembagian pekerjaan, macam-macam tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi itu dibagi-bagi sedemikian rupa supaya dapat dilaksanakan oleh suatu unit tertentu.

Menurut Wursanti (2005: 233), prinsip rentangan pengawasan juga disebut prinsip rentangan kendali, prinsip rentangan kontrol dan ada juga yang menyebut dengan istilah prinsip jenjang pengawasan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan berbagai istilah, seperti *Span Of Control*, *Span Of Supervision*, *Span Of Management*, dan juga ada yang menyebut dengan istilah *Span Of Authority*. Wursanto (2005: 233) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “Rentangan pengawasan adalah seberapa jauh kemampuan seorang pemimpin dalam mengawasi para bawahannya secara cepat dan tepat”. Sedangkan Sutarto (2006: 172) memberikan definisi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan azas rentangan kontrol adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. Yang dimaksud dengan bawahan langsung adalah sejumlah pejabat yang langsung berkedudukan di bawah seorang atasan tertentu. Yang dimaksud dengan atasan langsung adalah seorang pejabat yang memimpin langsung sejumlah bawahan tertentu.

Apabila dilihat dari segi jumlah bawahan yang harus diawasi, Wursanto (2005: 233) membedakan rentangan pengawasan menjadi dua yaitu rentangan pengawasan yang luas dan rentangan pengawasan yang sempit. Rentangan pengawasan dapat dikatakan luas jika jumlah bawahan yang harus diawasi oleh seorang atasan cukup banyak. Sedangkan rentangan pengawasan sempit jika jumlah bawahan yang harus diawasi oleh seorang atasan relatif sedikit atau kecil.

Prinsip pelimpahan wewenang disebut juga pelimpahan kekuasaan atau pelimpahan tanggung jawab. Istilah pelimpahan wewenang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris *Delegation Of Authority*. Malayu S.P. Hasibuan (2017: 4) menyatakan bahwa: “Pihak bawahan menerima wewenang

dari atasan, tetapi pada saat yang sama atasan yang bersangkutan tetap memiliki wewenang tersebut”.

Pelimpahan juga sama dengan penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Jadi, pelimpahan atau penyerahan wewenang itu bukan penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat yang harus diikuti dengan pertanggungjawaban.

Prinsip departementalisasi merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yakni *Departmentalization* atau *Divisionalization*. Wursanto (2005: 242) memberikan penjelasan tentang departementalisasi sebagai berikut:

Departementasi (*Departmentation*) adalah proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok pekerjaan yang sejenis. Kelompok pekerjaan yang sejenis dinamakan fungsi. Setiap fungsi merupakan tugas dan tanggung jawab dari suatu unit tertentu dalam organisasi.

Sementara itu, Sutarto (2006: 66) juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan departementalisasi adalah:

Departementisasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan-satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu. Fungsi adalah sekelompok aktivitas sejenis berdasarkan kesamaan sifatnya atau pelaksanaannya

Anggota merupakan penggerak organisasi untuk mewujudkan fungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penempatan orang yang tepat adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah tepat atau tidaknya seseorang ditempatkan pada posisi tertentu yang ada di dalam organisasi. Penempatan orang atau anggota meliputi anggota baru dan anggota

lama, sebagaimana dikemukakan oleh Werther dan Keith Davis (dalam Fam Utama, 1997: 13) bahwa *Placement is the Assignment Or Reassignment Of An Employee To A New Of Different Job*. Jadi, penempatan anggota dalam sebuah organisasi merupakan penugasan atau penugasan kembali seorang anggota kepada tugas yang baru atau tugas yang berbeda. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2001: 64) penempatan anggota hendaknya memperlihatkan azas penempatan orang-orang yang tepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat atau *the right man in the right place and the right man on the right job*. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya prinsip atau azas orang yang tepat di tempat yang tepat akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efisiensi kerja dalam organisasi.

Di dalam organisasi mutlak diperlukan koordinasi, sebagaimana dikemukakan oleh Henry G. Hodges dan Herbert G. Hicks (dalam Sutarto, 2006: 145-146) bahwa *Coordination Is The Fundamental Principle Of Organization* (Koordinasi adalah azas pokok organisasi) atau dapat pula dikatakan bahwa *Coordination Is A Common Principle In All Organization* (Koordinasi adalah azas umum dalam organisasi). Dydiet Hardjito (2001: 47) memberikan pengertian tentang koordinasi bahwa “Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan dari satuan-satuan yang terpisah (unit-unit) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”. Sedangkan Gilbert (dalam Sule dan Saefullah, 2009: 159) mengemukakan bahwa koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif.

Dalam sebuah organisasi, pemberian balas jasa atau imbalan jasa (*Compentation*) merupakan hal yang sangat kompleks tetapi mempunyai arti penting bagi anggota maupun organisasi itu sendiri. Menurut Wursanto (2005: 255), Balas jasa adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang atau jerih payah yang telah disumbangkannya. Handoko (2001: 155) juga memberikan pengertian imbalan jasa atau kompensasi sebagai segala sesuatu yang diterima oleh para anggota sebagai balas jasa untuk mereka. Sedarmayanti (2001: 9) menyatakan bahwa Kompensasi adalah pemberian jasa langsung (*Direct*) dan tidak langsung (*Indirect*) berupa uang atau barang kepada anggota sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. Pemberian balas jasa langsung merupakan imbalan yang diterima secara rutin atau per periode oleh anggota, misalnya pemberian upah, gaji, insentif, dan bonus. Sedangkan pemberian balas jasa tidak langsung merupakan imbalan yang diterima pegawai atau anggota tidak secara rutin, misalnya penyediaan fasilitas transportasi, pemberian asuransi, dan sebagainya.

Berdasarkan Prinsip-prinsip organisasi di atas, maka prinsip-prinsip organisasi sering disebut dengan azas-azas organisasi. Prinsip atau azas merupakan dasar, pondasi, atau suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir. Jadi, secara singkat penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip atau azas-azas organisasi adalah pokok dasar atau pondasi yang menjadi pangkal total dalam menggerakkan suatu organisasi.

4. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan pengelolaan, yang merupakan wilayah kajian dari administrasi. Perkembangan

dan perubahan lingkungan dalam suatu negara menurut penyesuaian dalam sistem dan proses administrasi, dalam organisasi dan manajemen pemerintahan Negara.

Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Administrasi erat hubungannya dengan salah satu tugas pemerintah yaitu melayani kepentingan masyarakatnya. Keseluruhan kegiatannya mulai dari penentuan tujuan yang akan dicapai sampai dengan penyelenggaraan organisasi pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan negara. Secara sederhana, administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik.

Salah satu bagian inti administrasi merupakan manajemen dengan kata lain bisa disebut pengelolaan, didalamnya terdapat beberapa kegiatan yang tentunya berkaitan erat dengan bagaimana suatu organisasi menjalankan pengaturan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam penerapannya administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan hanya kegiatannya dapat dibedakan. Administrasi bersifat konsep menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh, sedangkan manajemen sebagai subkonsep yang bertugas melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah tertentu pada tingkat administrasi.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011: 21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan,

akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang setiap bidang mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan.

Jadi, kaitan antara administrasi dengan variabel penelitian yaitu untuk terciptanya suatu pengelolaan pasar yang baik, pengelolaan tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan melakukan suatu kerjasama, dalam hal ini yaitu pengelola pasar harus mampu memaksimalkan dan mengatur sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang tersedia secara baik, akuntabel dan transparan, dan juga diperlukan adanya suatu strategi manajemen untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, hal tersebut dapat memberikan sebuah solusi sehingga pengelolaan yang baik tersebut bisa terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan.

Oleh karena itu, dalam hal ini ada keterkaitannya antara administrasi dengan analisis pengelolaan pasar, dimana dalam pengelolaan yang baik dibutuhkan strategi manajemen yang baik yaitu dengan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian, mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya semua ini terdapat di dalam administrasi.

B. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris "*manage*" yang memiliki arti mengelola atau mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. Manajemen merupakan sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan

organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi itu.

Menurut Hasibuan (2012: 1-2) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Silalahi (2011: 6) mengemukakan pengertian manajemen sebagai berikut, “Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan sumberdaya, pengkomunikasian, kepemimpinan, pemotivasian dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dan penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasional secara efektif dan secara efisien.”

Sementara Ranjabar (2014: 24) mengemukakan pengertian administrasi sebagai berikut: “Manajemen berarti mengkoordinasikan usaha-usaha manusia sehingga tujuan individu diwujudkan dalam penghasilan sosial”

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen yaitu kegiatan penggunaan sumberdaya yang terdapat di dalam organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Suatu proses kegiatan dari seseorang pimpinan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerjasama oranglain agar tujuan yang ditentukan lebih mudah terwujud. Dalam proses tersebut manajemen mempunyai sejumlah fungsi yang harus dilaksanakan.

1. Fungsi-Fungsi Manajemen

Menurut pendapat Mee (dalam Hasibuan, 2012: 3) membagi fungsi manajemen menjadi 4 (empat), yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan);
2. *Organizing* (Pengorganisasian);
3. *Motivating* (Pemberian Motivasi);
4. *Controlling* (Pengawasan).

Siagian (dalam Hasibuan, 2012: 3) membagi fungsi manajemen ke dalam 5 (lima) bagian, diantaranya:

1. Perencanaan;
2. Pengorganisasian;
3. Pemberian Motivasi;
4. Pengawasan;
5. Penilaian.

Menurut pendapat Fayol (dalam Silalahi, 2011: 41) fungsi manajemen dikelompokkan ke dalam 5 (lima) fungsi, yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan);
2. *Organizing* (Pengorganisasian);
3. *Commanding* (Pemberian Komando);
4. *Coordinating* (Pengkoordinasian);
5. *Controlling* (Pengawasan).

Maka dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2. Prinsip-prinsip Manajemen

Fayol (dalam Sukarna, 1990: 18) mengemukakan prinsip-prinsip umum manajemen, walaupun prinsip-prinsip ini tidak mutlak, tetapi dapat diterapkan terhadap segala bidang untuk mencapai suatu tujuan dengan variasi yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Adapun prinsip umum tersebut ada 14, yaitu:

1. *Division of work* (pembagian kerja);
Di dalam setiap usaha baik itu yang dilakukan pemerintah atau perusahaan harus ada pembagian kerja yang sebaik-baiknya di antara para pegawai, supaya tujuannya itu dapat tercapai. Di dalam pembagian kerja terhadap pegawai itu harus memperhatikan kualitas fisik, moral, mental, pendidikan dan pengalaman;
2. *Authority and Responsibility* (wewenang dan tanggung jawab);
Setiap pekerjaan akan dilengkapi wewenang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Hanya saja terhadap wewenang ini diperoleh pada waktu pembagian kerja, oleh karenanya menuntut pertanggung jawaban terhadap penyelenggaraan pekerjaan;
3. *Discipline* (disiplin);
Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin ini erat kaitannya dengan *authority*, mengingat bila *authority* tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin itu akan hilang. Pelaksanaan *authority* yang dipaksakan tidak akan menimbulkan disiplin hidup, melainkan disiplin mati yang akan membawa kepada suasana kerja yang diliputi ketakutan, sehingga pekerja tidak bekerja dengan kesadaran dan perasaan tanggung jawab sepenuhnya, melainkan bekerja dengan asal saja atau bekerja dengan rasa kesal;
4. *Unity of command* (kesatuan perintah);
Dalam pembagian kerja terhadap para pekerja harus pula diperhatikan prinsip kesatuan perintah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana mestinya, mengingat setiap pegawai tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab, sesuai dengan dari mana *authority* itu diperolehnya.
Asas *Unity of Command* merupakan asas yang sangat penting dalam suatu organisasi, mengingat akan menjamin tertibnya lalu-lintas wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja, sehingga kegiatan kerja terarah terhadap sarasannya yang akan menjamin tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
5. *Unity of direction* (kesatuan arah);
Di dalam setiap usaha baik dalam bidang niaga atau pemerintah perlu diarahkan kepada sarasannya. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan terhadap seluruh pegawai, agar mereka menyadari sepenuhnya akan

tugas-tugas dan kewajibannya, mengingat tujuan bersama tidak akan tercapai apabila seluruh kegiatan daripada pegawai tidak terarah.

Kesatuan pengarahan sebenarnya bertalian erat dengan pembagian kerja. Suatu pembagian kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan, maka jelas pelaksanaan kerja itu tidak akan terarah kepada sasarannya;

6. *Subordination of individual interest to general interest* (mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan umum);

Merupakan syarat yang sangat penting agar setiap usaha berjalan dengan lancar sehingga dapat tercapai tujuannya, bahwa setiap pegawai harus mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan umum, mengingat berhasilnya suatu usaha akan menyangkut kepentingan-kepentingan seluruh pegawai khususnya dan kepentingan masyarakat pada umumnya;

7. *Remuneration of personnel* (penggajian karyawan);

Gaji atau upah merupakan faktor determinan atau menentukan untuk terwujudnya kelancaran kerja di dalam suatu usaha. Hal ini disebabkan manusia itu mempunyai kebutuhan material dan spiritual atau kebutuhan jasmaniah dan rohaniah;

8. *Centralization* (pemusatan);

Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan pertanggung jawabandalam usaha untuk mencapai tujuan. Jadi pertanggung jawaban terakhir dalam suatu usaha baik niaga maupun pemerintah terletak pada yang mempunyai wewenang tertinggi atau *top administrator/manager*.

Pemusatan wewenang tidak berarti adanya keleluasaan untuk menggunakan authority sewenang-wenang, melainkan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam lalu-lintas wewenang dan kesimpangsiuran dalam lalu-lintas pertanggung jawaban;

9. *Schalar Chain* (jenjang bertangga, hierarkhi);

Setiap pembagian kerja akan menimbulkan adanya “atasan” dan “bawahan” artinya ada orang yang harus bertanggung jawab secara keseluruhan dan bertanggung jawab sebagian.

Manakala pembagian kerja itu mencakup dalam arena yang cukup luas, maka akan menimbulkan hierarkhi, yaitu adanya eselon ringgi, menengah dan rendah;

10. *Order* (ketertiban);

Ketertiban dalam melakukan pekerjaan merupakan syarat utama/penting. Mengingat orang itu pada dasarnya tidak ada yang dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam suatu keadaan yang penuh ketegangan dan kekacauan.

Ketertiban dalam sesuatu pekerjaan hanya dapat terwujud apabila seluruh pegawai baik atasan maupun bawahan mempunyai rasa disiplin yang tinggi;

11. *Equity* (keadilan dan kejujuran);

Keadilan dan kejujuran bertalian dengan moral pegawai. Antara keadilan dan kejujuran sukar untuk dipisahkan. Orang yang berlaku jujur biasanya berlaku adil.

Oleh karena itu, keadilan dan kejujuran pegawai dalam suatu usaha baik dalam dunia pemerintahan ataupun niaga merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

12. *Stability of tenure of personnel* (stabilitas kondisi karyawan);
 Dalam setiap usaha ketabihan karyawan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar sehingga sampai kepada tujuannya.
 Kestabilan karyawan tidak dapat dipaksa dengan kekuasaan ataupun ketakutan, mengingat hal ini walaupun berhasil hanyalah bersifat sementara. Kestabilan karyawan hanya akan terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam usaha itu;
13. *Initiative* (prakarsa, inisiatif);
 Pengembangan prakarsa pegawai di dalam suatu usaha yang menghendaki adanya kemajuan, merupakan faktor yang harus diperhatikan. Prakarsa itu timbulnya dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikirnya dengan sebaik-baiknya dan timbul dari kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang berguna bagi penyelesaian sesuatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan dipengaruhi oleh pengalaman dan/ atau keahliannya, agar tujuan dapat tercapai.
 Dalam inisiatif itu terhimpun kehendak, perasaan, pikiran, keahlian dan pengalaman seseorang;
14. *Esprit de corps* (semangat kesatuan korps);
 Setiap pegawai harus mempunyai rasa kesatuan dengan Unitnya yaitu rasa senasib sepenanggungan. Perasaan ini akan timbul apabila dalam pekerjaan itu diliputi kerjasama yang sebaik-baiknya, dan bukan kerjasama yang dipaksakan atau dalam keadaan “terpaksa”.

Dalam uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip manajemen merupakan dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen.

C. Pengertian Pengelolaan Pasar

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian

suatu tujuan tertentu. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011: 21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Nugroho (2003: 119) mengemukakan bahwa:

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya Adisasmita (2011: 21) mendefinisikan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dari pengertian pengelolaan di atas menitikberatkan pada suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, istilah pengelolaan itu sendiri identik dengan istilah manajemen.

Lebih lanjut Moekijat (2001: 1) mengemukakan bahwa:

Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk

menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Dengan demikian, Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain:

Sedangkan Terry (2009: 9) mengemukakan bahwa:

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau sering disebut manajemen merupakan suatu seni untuk mengatur atau mengelola semua sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan, pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan, atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap

pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan tidak ada gunanya dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Menurut Sedarmayanti (2001: 7) tujuan pengelolaan ini sama dengan tujuan MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia).

Ada beberapa tujuan yang lebih operasional sebagai berikut:

1. Tujuan Masyarakat (*Social Objective*)
Untuk bertanggung jawab secara sosial, dalam hal kebutuhan dan tantangan yang timbul dan masyarakat.
2. Tujuan Organisasi (*Organization Objective*)
Untuk melihat bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada (*exist*), maka perlu adanya kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan.
3. Tujuan Fungsi (*Functional Objective*)
Untuk memelihara kontribusi bagian lain agar mereka (sumber daya manusia dalam tiap bagian)
4. Tujuan Personal (*Personal Objective*)
Untuk membantu pegawai dalam mencapai tujuan pribadinya, guna mencapai tujuan organisasi. Tujuan pribadi pegawai diharapkan dapat dipenuhi, dan sudah merupakan motivasi pemeliharaan terhadap pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan tujuan di atas, maka tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat dan harus adanya pengembangan serta memelihara sumber daya tersebut dengan baik.

Affifudin (2010: 3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan Strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil dan batasan waktu
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
6. Menentukan ukuran untuk menilai
7. Mengadakan pertemuan pelaksanaan
8. Mengadakan penilaian

9. Mengadakan *review* secara berkala
10. Pelaksanaan tahap berikutnya berlangsung berulang-ulang

Berdasarkan uraian di atas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

3. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan salah satu fasilitas umum yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia terutama dalam hal pangan dan sandang. Proses yang mudah dan bisa tawar menawar menjadi kelebihan tersendiri bagi pasar tradisional tetap diminati masyarakat.

Pengertian pasar menurut peraturan presiden nomor 112 tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda dan los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi atau swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar.

Selanjutnya pengertian pasar tradisional menurut Wikipedia yaitu sebagai berikut:

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran yang terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Kemudian menurut kamus besar bahasa Indonesia, didefinisi dari pasar adalah tempat orang berjual beli, pekan. Sedangkan definisi tradisional adalah

tradisi (adat). Dengan demikian pasar tradisional dapat diartikan menjadi tempat orang-orang berjual beli kebutuhan sehari-harinya yang memiliki adat tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pasar tradisional merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli ditandai dengan adanya proses transaksi secara langsung, dilakukan pada kios, toko atau dasaran yang dibuka oleh pedagang maupun pengelola.

4. Dimensi Pengelolaan Pasar Tradisional

Menurut G.R Terry dalam (Winardi, 2012: 163) menyatakan, fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian sub bagian tubuh yang berada di manajemen sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. fungsi-fungsi manajemen terdiri dari : Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan Pengawasan (*controlling*).

Adapun penjelasan dari dimensi-dimensi pengelolaan sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan meliputi tindakan: Memilih juga menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan, dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan, juga dianggap sebagai mempersiapkan tindakan-

tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan yang sekarang.

Memang harus diakui bahwa tujuan-tujuan tertentu dicapai dengan perencanaan yang tidak berarti, tetapi pada abad modern ini dimana macam-macam tugas menjadi kompleks, lebih banyak teknologi yang terpaut dengannya, lebih banyak orang perlu diberikan informasi dan turut berpartisipasi dalam pekerjaan yang akan datang dan dengan diversitas produk-produk serta jasa-jasa yang bertambah banyak, maka perencanaan menjadi sesuatu keharusan.

Ada macam-macam keuntungan yang berkaitan dengan perencanaan formal yang dapat menyebabkan para pimpinan pada semua tingkatan sesuatu organisasi mengarahkan lebih banyak waktu dan upaya sehubungan dengan fungsi manajemen premier ini. Terry (dalam Winardi, 2012: 164-206) menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari perencanaan:

- 1 Timbulnya aktivitas-aktivitas teratur yang ditujukan ke arah pencapaian sasaran.
- 2 Perencanaan menunjukkan perlu diadakannya perubahan pada masa yang akan datang.
- 3 Perencanaan menjawab pertanyaan-pertanyaan.
- 4 Iya memberikan sebuah dasar atau landasan untuk melakukan pengawasan.
- 5 Perencanaan mendorong orang memberikan prestasi (sebaik mungkin).
- 6 Perencanaan melaksanakan orang untuk memandang perusahaan secara menyeluruh.
- 7 Perencanaan memperbesar dan mengimbangkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas.
- 8 Perencanaan membantu seorang manajer mencapai "status".

Kerugian-kerugian dari perencanaan :

- 1 Perencanaan menjadi terbatas karena kurang tepatnya keterangan-keterangan dari fakta-fakta masa yang akan datang.
- 2 Perencanaan memerlukan biaya besar.
- 3 Perencanaan mempunyai penghalang-penghalang psikologis.

- 4 Perencanaan mematkan inisiatif.
- 5 Perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan-tindakan yang perlu dilakukan (dalam keadaan darurat).
- 6 Perencanaan kadang-kadang dilakukan secara berlebihan para perencana.
- 7 Perencanaan memiliki nilai-nilai praktis yang terbatas.

Aktivitas-aktivitas didalam proses perencanaan yaitu:

- 1 Penetapan tujuan
- 2 Program kerja
- 3 Penganggaran

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian mempersatukan sumber-sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang dalam pola yang demikian rupa, hingga mereka dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian mempersatukan orang-orang pada tugas yang saling berkaitan.

Istilah pengorganisasian berasal dari perkataan *Organism* (Organisme) yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegrasi demikian rupa hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan.

Apabila suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih bekerja sama kearah tujuan bersama, maka hubungan antara mereka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti misalnya siapa yang mengambil keputusan dalam bidang mana, siapa melaksanakan pekerjaan macam apa, tindakan apa perlu dilakukan apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu.

Terry (dalam Winardi, 2012: 233) mengemukakan bahwa:

Pengorganisaian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja

sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Dengan perkataan lain, salah satu bagian penting tugas pengorganisasian adalah mengharmoniskan suatu kelompok orang-orang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan kesemuanya kesatu arah tertentu.

Prinsip yang dipandangnya bermanfaat dalam mengelola organisasi sebagai berikut:

- 1 Prinsip pembagian kerja
- 2 Prinsip otoritas dan tanggung jawab
3. *Actuating* (Penggerakan)

Menggerakan (*Actuating*) merupakan fungsi manajemen fundamental manajemen ketiga yang akan fibahas secara agak terperinci. Memang diakui bahwa usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian sampai kita mengimplementasi aktivitas-aktivitas yang diusahakan dan yang diorganisasi.

Actuating merupakan usaha untuk menggerakan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka bersangkutan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Hal yang dapat dilakukan dalam penggerakan yaitu sebagai berikut:

- 1 Pengarahan
- 2 Motivasi
- 3 Koordinasi

4 Bimbingan



4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan kreatif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. *Controlling* atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam hasil yang dicapai dan aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Pengawasan dalam arti manajemen yang diformalkan tidak akan terdapat tanpa adanya perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan sebelumnya. Pengawasan tidak dapat terjadi dalam sebuah vakum. Pengawasan dilaksanakan untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen tersebut dilaksanakan. Kegagalan pengawasan berarti cepat atau lambat adanya kegagalan perencanaan-perencanaan dan suksesnya perencanaan berarti suksesnya pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1 Pengawasan langsung dan,
- 2 Asas tanggung jawab pengawasan

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengelolaan suatu kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), *Controlling* (Pengawasan). Fungsi-fungsi manajemen tersebut dilakukan secara bertahap sistematis, terukur dan berkesinambungan.

5. Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Pasar Tradisional

Menurut Jacobus Ranjabar, S.H., M.Si. (2015: 46-48) menyatakan bahwa, adanya dua aspek yang cenderung dapat timbul diantara berbagai proses yang menyukarkan penciptaan pengelolaan yang baik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan Keputusan
 - a. Pengambilan Keputusan kegiatan yang repentitif
 - b. Subjektivitas dalam pengambilan keputusan
2. Aspek Kualitatif
 - a. Keterbatasan dalam pengetahuan bidang
 - b. Keterbatasan dalam pengalaman
 - c. Keterbatasan dalam wibawa
 - d. Keterbatasan dalam kewenangan
 - e. Keterbatasan dalam pengetahuan, pengumpulan dan pemanfaatan data

Indikator-indikator dari faktor penghambat pengelolaan tersebut dapat menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan dalam proses pengelolaan.

6. Upaya-Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan Pasar Tradisional

Dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dapat terwujud apabila dikerjakan oleh seorang manajer yang terampil dalam menggunakan faktor-faktor yang mendukung menurut Jacobus Ranjabar, S.H., M.Si. (2015: 19-20), diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Keterampilan Teknikal

Kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur-prosedur, atau teknik-teknik bidang khusus yang terspesialisasi untuk mana mereka bertanggung jawab, misalnya seorang perawat, seorang dokter, seorang akuntan, dan lain sebagainya. (Keterampilan vokasional yang dicapai melalui spesialisasi kerja).

2. Keterampilan Manusia

Kemampuan untuk bekerja dengan dan memahami orang-orang. Untuk dapat mememanajementi orang-orang secara efektif, maka para manajer perlu berpartisipasi secara efektif dengan pihak lain. (Keterampilan untuk bekerja dengan manusia yang berhadapan dengan keterampilan teknis dalam hal bekerja dengan barang-barang dan proses-proses)

3. Kemampuan Konseptual

Kemampuan untuk memahami dan merangkum semua aktivitas dan kepentingan-kepentingan organisasi yang bersangkutan. Keterampilan demikian mencakup pula pemahaman tentang bagaimana bagian-bagiannya tergantung atau berhubungan satu sama yang lain. (Kemampuan untuk memahami hubungan antar bagian-bagian sebuah organisasi dan tujuan-tujuan organisasi secara menyeluruh).

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti terlebih dahulu menggunakan penelitian terdahulu yang berupa skripsi sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, hal ini untuk mempermudah peneliti dapat menyusun dan mempertimbangkan penyusunan skripsi.

Berikut adalah hasil-hasil peneliti terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL
1.	Okki Hikmah Hanudin (STIA Sebelas April Sumedang tahun 2017) Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Bantarujeg Kabupaten Majalengka)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian pada pengelolaan pasar tradisional. 2. Metode Penelitian kualitatif. 3. Teknik pengambilan data wawancara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokus penelitiannya dilakukan di Pasar Tradisional Bantarujeg Kabupaten Majalengka 	<p>Hasil penelitian dari Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Bantarujeg Kabupaten Majalengka sudah berjalan baik namun belum maksimal. Hal ini dapat terlihat dari beberapa hal tersebut dikarenakan belum teranggarkannya kebutuhan pendanaan pada perencanaan pengeluaran di Desa Bantarujeg, belum terealisasinya perluasan pasar hal tersebut dikarenakan lokasi yang memang sulit diperluas dikarenakan sudah padat penduduknya di lingkungan pasar dan pembangunan pos keamanan yang belum terealisasi.</p>
2.	Dea Nur'ul	1. Variabel	1 Fokus	Hasil penelitian

No.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL
	Fauzi (STIA Sebelas April Sumedang tahun 2019) Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.	<p>yang diteliti adalah tentang variabel pengelolaan</p> <p>2. Metode penelitian kualitatif</p> <p>3. Teknik pengambilan data wawancara</p>	<p>penelitian pada pengelolaan sampah</p> <p>2. Lokus penelitiannya dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang</p>	<p>diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan sampah sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa hal yaitu belum maksimalnya biaya pengadaan alat, jumlah pegawai dan kurangnya koordinasi dengan berbagai daerah diluar pelayanan yang mengakibatkan permasalahan sampah belum teratasi secara tuntas.</p>
3.	Evi Revitasari (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017) Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak	<p>1. Fokus penelitian pada pengelolaan pasar tradisional.</p> <p>2. Metode Penelitian Kualitatif</p> <p>3. Teknik pengambilan data wawancara</p>	<p>1. Lokus penelitiannya dilakukan di Kabupaten Lebak</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurang optimalnya pengawasan dan ketegasan para petugas terhadap pemungutan retribusi pasar pada kios dan los, serta kondisi lahan pasar yang sempit mengakibatkan para pedagang kaki lima tidak tertampung. Kurangnya</p>

No.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL
				pelatihan pegawai menjadi faktor penghambat dalam proses sosialisasi terhadap pedagang.
4.	Arip Rahman Sudrajat (STIA Sebelas April Sumedang, 2018) Jurnal Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian pada pengelolaan pasar tradisional. 2. Lokus penelitiannya di Kabupaten Sumedang 3. Metode penelitian kualitatif 4. Teknik pengambilan data wawancara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitiannya mencakup seluruh pasar tradisional di Kabupaten Sumedang 2. Penelitian ini berbentuk jurnal 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan strategi pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang pada saat ini belum sesuai dengan elemen pada manajemen strategis secara utuh, dimana dalam merumuskan dan menetapkan strategi, para pimpinan belum memiliki analisis yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang pada khususnya Disperindag Kabupaten Sumedang itu sendiri, serta belum memberdayakan keunggulan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten</p>

No.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL
				Sumedang yang dikaitkan dengan tantangan lingkungan, dan belum sepenuhnya dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang dapat dicapai.
5.	Arip Rahman Sudrajat (STIA Sebelas April Sumedang, 2019) Jurnal Pengamatan Lingkungan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fokus Penelitian pada pengelolaan pasar tradisional 2 Lokus penelitiannya di Kabupaten Sumedang 3 Metode penelitian kualitatif 4 Teknik pengambilan data wawancara 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penelitiannya mencakup seluruh pasar tradisional di Kabupaten Sumedang 2 Penelitian ini berbentuk jurnal 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek analisis eksternal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang ini, belum sepenuhnya dapat menganalisis keadaan eksternal yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang untuk dijadikan suatu kekuatan atau daya dukung

No.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL
				<p>dalam pelaksanaan manajemen strategis pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang, ditandai dengan sarana dan prasarana penunjang lingkungan kerja yang masih terbatas dan lingkungan sosial yang masih menyisakan permasalahan sosial dari lemahnya penanganan sampah serta penempatan para Pedagang Kaki Lima. Sedangkan analisis internal pada aspek budaya harus diperbaiki dalam hal kedisiplinan kerja pegawai dan kompetensi sumber daya manusia harus ditingkatkan disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian kerja</p>

Dari kelima kajian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar ini layak untuk diteliti kembali karena melihat masih

banyaknya masalah yang disebabkan oleh faktor penghambat dalam pengelolaan pasar yaitu dari segi partisipasi masyarakat (pedagang/pembeli) dan dari pihak pemerintah untuk mengelola pasar tradisional dengan kurangnya segi pembiayaan atau anggaran untuk melakukan pengelolaan pasar.

E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Instrumen Penelitian

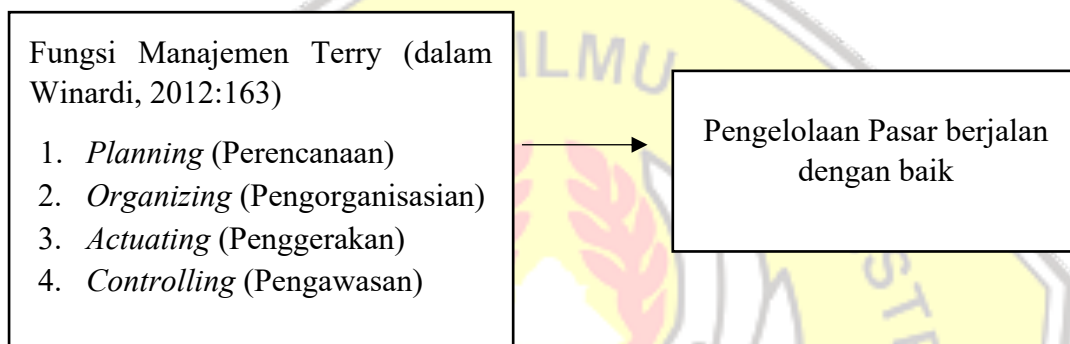
1. Kerangka Pemikiran

Didalam inti administrasi adanya organisasi dan manajemen, roda organisasi akan berjalan secara dinamis apabila manajemen didalam organisasi itu sendiri diterapkan dengan baik. Dengan bekerjasama, maka pekerjaan akan terasa lebih ringan. Selain itu pekerjaan atau tugas akan lebih cepat terselesaikan dibandingkan dengan hanya bekerja seorang diri.

Landasan berpikir dalam melakukan kegiatan ini, peneliti mengambil teori yang berhubungan dengan manajemen. Pengelolaan atau manajemen berfungsi untuk melakukan semua kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam mencapai tujuan dengan batas-batas kebijakan umum yang telah digariskan dalam tingkat administrasi. Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pada dasarnya menitikberatkan pada fungsi-fungsi manajemen seperti menurut Terry (dalam Winardi 2012: 163) yang meliputi (*planning*) perencanaan, (*Organizing*) pengorganisasian, (*Actuating*) penggerakan dan (*Controlling*) pengawasan agar sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitupun dengan pengelolaan pasar dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi

manajemen agar berjalan dengan baik serta menciptakan lingkungan yang bersih di dalam pasar.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, yang dimana masih terdapat fasilitas yang bocor membuat lingkungan tidak nyaman dan juga ketidakdisiplinan pegawai UPT maka peneliti memiliki kerangka pemikiran yang digambarkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Teori yang dijadikan landasan dalam pertanyaan penelitian ini adalah fungsi-fungsi manajemen menurut Terry (dalam Winardi, 2012: 163) yang terdiri dari:

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Actuating* (Penggerakan)

4. *Controlling* (Pengawasan)

Dalam melakukan sebuah penelitian, kita perlu menggali banyak informasi tentang objek penelitian yang akan diteliti. Untuk mendukung hal tersebut penulis perlu menyusun kisi-kisi pertanyaan yang dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Indikator	No Item
Pengelolaan pasar tradisioal Sumedang Kota Fungsi Manajemen Terry (dalam Winardi, 2012: 163)	1. <i>Planning</i> (Perencanaan)	a. Penetapan Tujuan	1
		b. Program Kerja	2
		c. Penganggaran	3
	2. <i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	a. Prinsip Pembagian Kerja	4
		b. Prinsip Otoritas dan Tanggung jawab	5
	3. <i>Actuating</i> (Penggerakan)	a. Pengarahan	6
		b. Motivasi	7
		c. Koordinasi	8
		d. Bimbingan	9
	4. <i>Controlling</i> (Pengawasan)	a. Pengawasan	10
		b. Asas tanggung jawab pengawasan	11
Hambatan pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota menurut Jacobus Ranjabar, S.H., M.Si. (2015: 46-48)	1. Pengambilan Keputusan	a. Pengambilan Keputusan kegiatan yang repetitif	12
		b. Subjektifitas dalam pengambilan keputusan	13
	2. Aspek Kualitatif	a. Keterbatasan dalam pengetahuan bidang	14
		b. Keterbatasan dalam pengalaman	15
		c. Keterbatasan dalam kewenangan	16

		d. Keterbatasan dalam pengetahuan, pengumpulan dan pemanfaatan data	17
Upaya mengatasi hambatan pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota menurut UPT Pasar Kota menurut Jacobus Ranjabar, S.H., M.Si. (2015: 19-20)	1. Keterampilan Teknikal	a. Penguasaan alat-alat	18
		b. Penguasaan prosedur-prosedur	19
		c. Penguasaan teknik-teknik	20
	2. Keterampilan manusia	a. Penegasan arahan	21
		b. Penyampaian informasi singkat dan jelas	22
	3. Keterampilan Konseptual	a. Pengawasan langsung	23
		b. Memahami tujuan organisasi secara menyeluruh	24



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sedangkan menurut Sugiyono (2017: 9), metode kualitatif adalah:

Penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif menurut Bodgan and Biklen yang dikutip oleh Sugiyono (2017: 13) memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and researcher is the key instrument.* (dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci).
2. *Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of words of pictures rather than number.* (penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka).
3. *Qualitative research are concerned with process rather than simply with outcomes or product.* (penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*).
4. *Qualitative research tend to analyze their data inductively.* (penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif).
5. *“Meaning” is of essential to the qualitative approach.* (penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati)).

Penelitian kualitatif menurut Moloeng (2014: 8-13), memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut;;

1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat (instrumen)
3. Metode kualitatif
4. Analisis dan secara induktif
5. Teori dan dasar
6. Deskriptif
7. Lebih mementingkan proses daripada hasil
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
10. Desain yang bersifat sementara
11. Hasil penelitian ditundingkan dan disepakati bersama

Dalam penelitian ini yang diamati adalah Pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang.

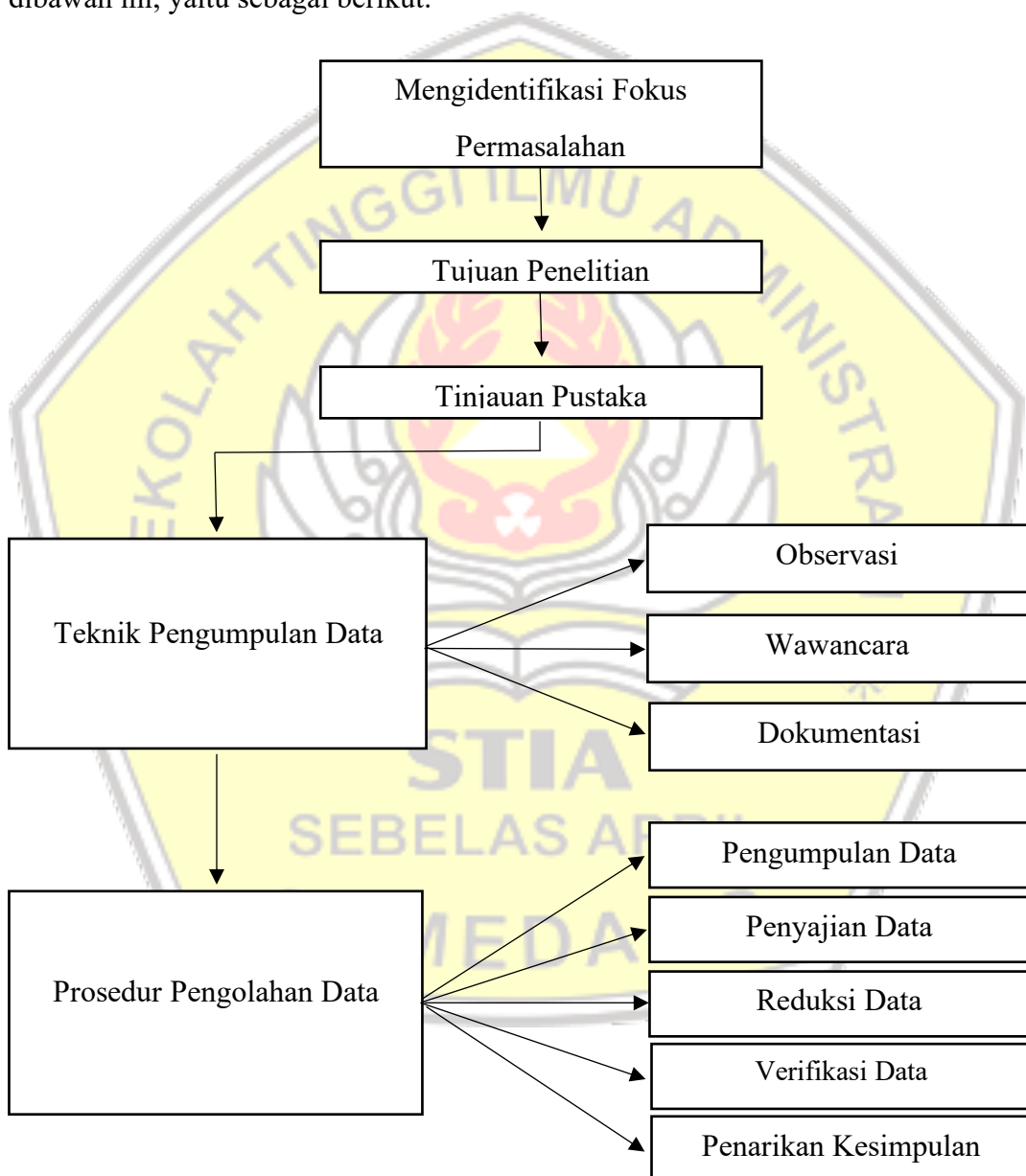
Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang didapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010: 205), yaitu:

Dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif ini bukan karena metode kualitatif ini baru dan lebih (*trendy*), tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan jawabannya dengan metode kualitatif.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat diperoleh data yang lebih tuntas, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan peneliti dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan Desain Penelitian dibawah ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.1
Desain Penelitian

B. Penentuan Sasaran, Informan dan Narasumber Penelitian

1. Penentuan Sasaran

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa manusia, benda ataupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk keseluruhan karakteristik objek, penelitian ini disebut objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tapi oleh Spardey yang dikutip Sugiyono (2017: 215), dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*acticity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sasaran dalam penelitian ini yaitu para pegawai di UPT Pasar Kota yang memiliki jumlah pegawai sebanyak 30 orang dari semua pegawai di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang.

2. Informan Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat serta data diperoleh dari informan serta sampel. Informan adalah pegawai yang benar-benar memahami permasalahan dengan argumen bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2017: 216) mengatakan bahwa, *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun yang ditentukan menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi serta terlibat didalam pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang. Maka yang dijadikan informan atau sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Unsur	Jumlah
1.	Kepala UPT Pasar Sumedang Kota	1
2.	Kasubag Tata Usaha	1
3.	Koordinator Pasar Inpres	1
4.	Koordinator Kebersihan	1
5.	Koordinator Urusan Administrasi	1
Jumlah		5

Sumber: *Daftar Nama Pegawai UPTD Pasar Sumedang Kota*

Penyusunan mengambil sejumlah 5 orang tersebut diatas berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang baik secara keseluruhan maupun sebagian tergantung tupoksi dan tingkat wewenang serta tanggung jawabnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016: 224-241), sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data sekunder, melalui Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur, buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan yang berlaku, laporan-laporan, arsip serta dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang dapat menunjang kelancaran pencairan data.

2. Teknik pengumpulan data primer, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh di lapangan, dengan cara:
 - a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
 - b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berupa rekaman hasil wawancara, foto-foto, catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dengan observasi.

D. Prosedur Pengolahan dan Analisis data

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis data Model Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2017: 247-252), yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

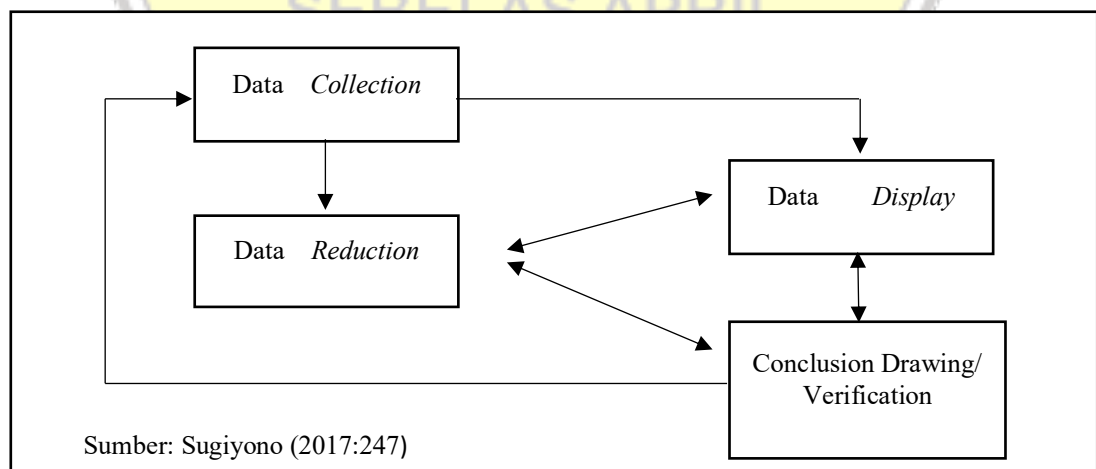
jelas mengenai masalah yang diteliti dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Sugiyono berpendapat bahwa yang sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, tabel dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh penelitian sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan.

3. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Yaitu penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran dari objek penelitian dan didukung oleh data-data yang akurat. Kesimpulan ini pada akhirnya dapat dijadikan hoptesis penelitian.

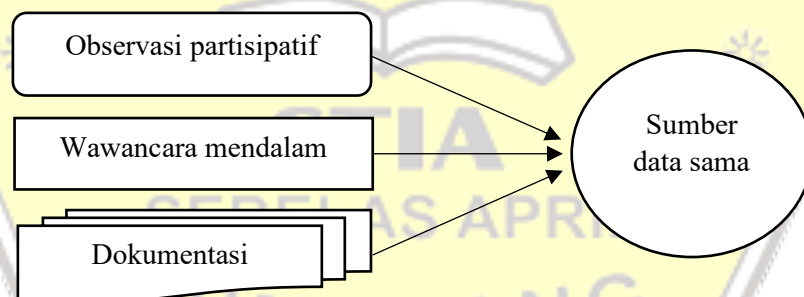


Gambar 3.2

Komponen dalam Analisis Data (*interactive model*)

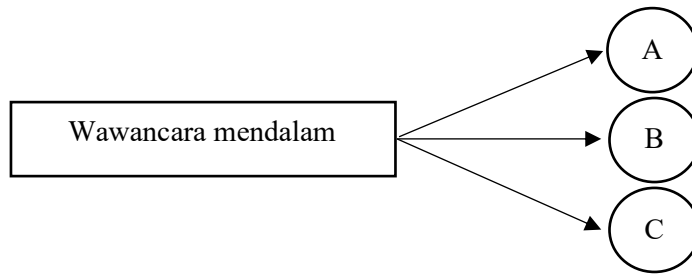
4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengolahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber daya yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber daya yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat digambarkan seperti dibawah ini:



Gambar 3.3

**Triangulasi “teknik” pengumpulan data
(bermacam-macam cara pada sumber yang sama)**



Gambar 3.4

**Triangulasi “sumber pengumpulan data
(satu teknik pengumpulan data pada sumber data A,B,C)**

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang. Penelitian ini dilaksanakan pada UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang, dengan jadwal penelitian pada tabel berikut:

**Tabel 3.2
Jadwal Kegiatan Penelitian 2019/2020**

No	Kegiatan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Agustus																					
		Waktu Pelaksanaan / Minggu Ke																											
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Tahap Persiapan																												
	a. Studi Kepustakaan																												
	b. Observasi Awal																												
	c. Penyusunan Proposal																												
	d. Seminar Proposal																												
	e. Perbaikan Proposal																												
2.	Tahap Pelaksanaan																												
	a. Pengumpulan Data																												
	b. Pengolahan Data																												
3.	Tahap																												

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai pengelolaan pasar tradisional sumedang kota di UPTD Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis pengelolaan pasar tradisional sumedang kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal.

Diuraikan sebagai berikut:

- a. *Planning* (Perencanaan) dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum begitu baik, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator seperti dalam penganggaran belum sepenuhnya dapat terealisasi dikarenakan memang terbatas dalam anggaran APBD dari Pemerintahan daerahnya.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian) sudah baik dari dalam pembagian kerja pada pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional dituangkan dengan adanya surat perintah dari pimpinan untuk bertugas sesuai tupoksinya masing-masing dengan jam kerja dari jam 08.00-14.00 WIB maupun melaksanakan kegiatannya mulai dari memungut retribusi, membersihkan lingkungan pasar dan melaksanakan inventarisasi kantor dan fasilitasi sarana prasarana.
- c. *Actuating* (Penggerakan) dirasakan sudah cukup optimal hal ini dapat dilihat dari pimpinan memberikan arahan setiap bulannya minimal satu

kali dengan diadakan evaluasi, Kepala UPTD sampai staff tidak segan memberikan contoh dengan turun langsung terjun ke lapangan ikut berbaur dengan petugas pelaksana, Bentuk motivasi yang diberikan pimpinan berupa mengingatkan tupoksi, *reward* dan *punshiman*, menjaga kekompakan dan lebih giat dalam melakukan pekerjaan.

- d. *Controlling* (Pengawasan) dikatakan belum optimal hal tersebut dapat dilihat dari masih ada keluhan dari pedagang tentang sampah yang belum dibersihkan atau berserakan, para petugas yang tidak masuk kerja dengan menyertakan surat dokter atau tanpa kabar dimana semuanya kurang penegasan kepada para pegawai dan bimbingan yang diberikan masih kurang.

2. Hambatan mengenai Pengelolaan Pasar Tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang. Adapun faktor-fasktor yang menghambat diantaranya:

- a. Pengambilan Keputusan yaitu dari Pengambilan keputusan yang rutin sudah terstruktur dalam SOP hanya masih ada para pegawai yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai SOP dan kadang kala melakukan pengambilan keputusan yang kurang tepat.
- b. Aspek Kualitatif yaitu keterbatasan dalam pengetahuan bidang dalam komunikasi dengan pedagang, kurangnya dalam kewenangan dan pengetahuan, pengumpulan dan pemanfaatan data yang dimana harus melihat laporan harian kerja terlebih dahulu.

3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan pasar tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota Kabupaten Sumedang diantaranya:
 - a. Keterampilan Teknikal yaitu dengan pengadaan barang yang harus diprioritaskan, memanfaatkan keahlian pegawai dalam pemeliharaan dan diadakannya diklat kepada para pegawai.
 - b. Keterampilan Manusia yaitu melakukan briefing dimana agar satu tujuan, penyampaian informasi singkat dan jelas dengan memanfaatkan aplikasi *messanger*.
 - c. Keterampilan Konseptual yaitu dengan diadakannya briefing yang dilakukan minimal dua kali dalam seminggu dan juga diingatkan oleh para koordinator, para petugas pun saling mengingatkan.

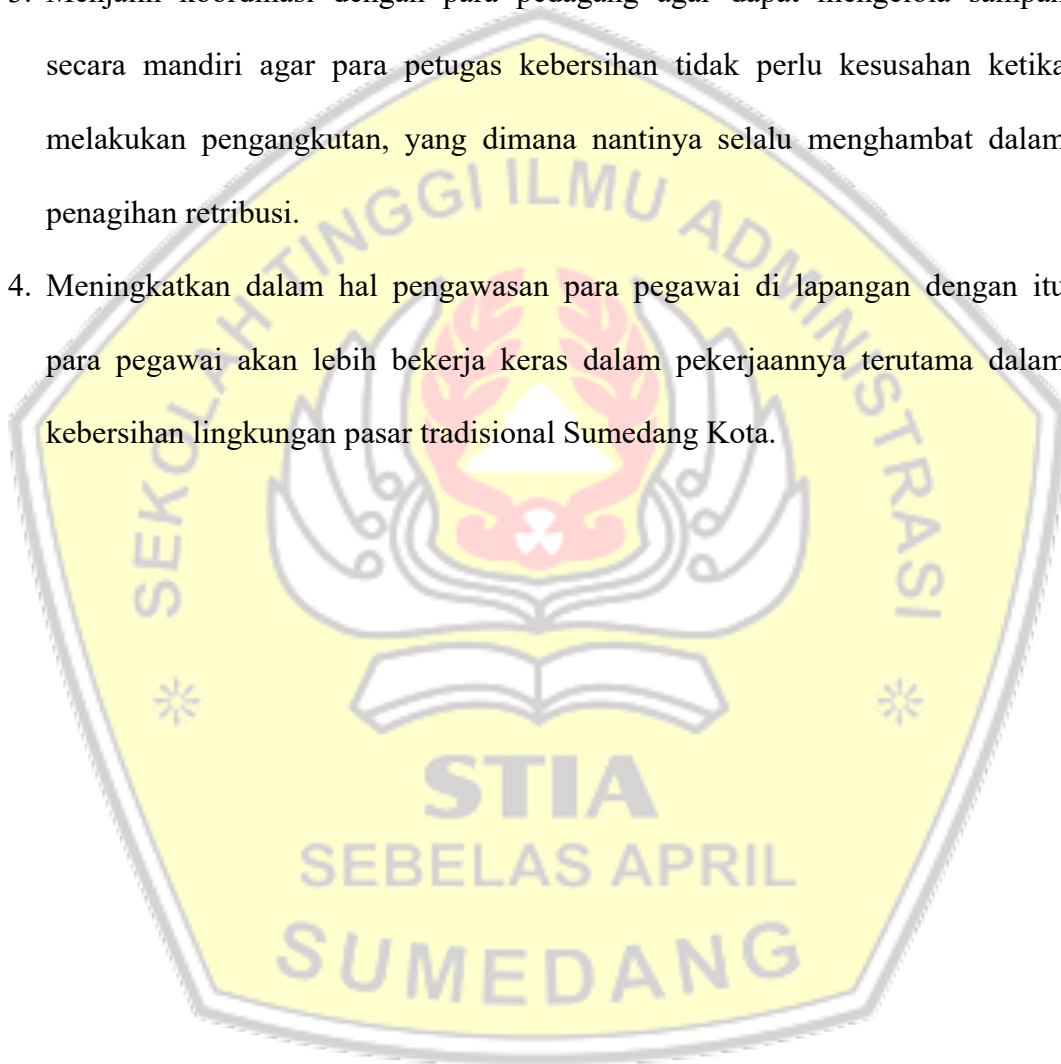
B. Saran

Pada akhir penulisan peneliti menuliskan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yang sekiranya dianggap perlu dipertimbangkan sebagai bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan.

Berikut ini beberapa saran :

1. Mengembangkan lagi keahlian pegawai dalam penguasaan dan pemeliharaan roda dengan menyesuaikan postur tubuh dengan roda yang dipakai agar roda yang tersedia dapat dimaksimalkan dengan baik sembari menunggu penambahan roda yang belum terealisasi.

2. Perlunya peningkatan komunikasi yang baik dari petugas pelaksana dengan cara pelatihan dikarenakan anggaran yang terbatas untuk melakukan diklat maka bisa melalui media sosial seperti Youtube, terdapat banyak konten ilmu komunikasi di Youtube juga.
3. Menjalin koordinasi dengan para pedagang agar dapat mengelola sampah secara mandiri agar para petugas kebersihan tidak perlu kesusahan ketika melakukan pengangkutan, yang dimana nantinya selalu menghambat dalam penagihan retribusi.
4. Meningkatkan dalam hal pengawasan para pegawai di lapangan dengan itu para pegawai akan lebih bekerja keras dalam pekerjaannya terutama dalam kebersihan lingkungan pasar tradisional Sumedang Kota.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha.
- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Akadun. 2011. *TeknologiE Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Atmosudirdjo, Slamet Prajudi. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Balai Aksara
- Dharma, Agus. 2001. *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: Rajawali
- Fathoni, Abdurrahmat. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jatinangor: Alkaprint
- Fauzi, Dea Nur'ul. 2019. *Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang*. Skripsi. Sumedang:STIA Sebelas April Sumedang
- Gie, The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Handoko, Hani T. 2003. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Iskandar, Jusman. 2005. *Kapita Selekta Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- Mangkunegara, A.P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Meleong, Lexy, J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya
- Hanudin, Oki Hikmah. 2017. *Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Bantarujeg Kabupaten Majalengka)*. Skripsi. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.
- Ranjabar, Jacobus. 2015. *Analisa Manajemen*. Bandung: Alfabeta

- Revitasari, Evi. 2017. *Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak*. Skripsi. Lebak: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Silalahi, Ulbert. 2007. *Studi tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Siswanto. 1989. *Manajemen Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Baru
- Sudrajat, Arif Rahman. 2019. *Pengamatan Lingkungan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang*. Jurnal. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.
- Sudrajat, Arif Rahman. 2018. *Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang*. Jurnal. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.
- Suwanto, Priansa. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Winardi. 2000. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Karawang: Kencana.
- _____. 2012. *Azas-azas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.

B. DOKUMEN-DOKUMEN

- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

